STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT KESEPAKATAN ALIRAN BEBAS BARANG MEA 2015

Elsa Yufani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Strategy to Attract Voters in the Region of Origin. This study explains the strategy of Indonesian government policy that aims to analyze the development of Indonesia's trade value with intra-ASEAN countries associated with the free flow of goods agreement Asean Economic Community (AEC). This study uses qualitative research methodologies and data collection techniques library research. Results from this study is the value of trade between Indonesia and intra-ASEAN countries is increasing. But the overall opening of the market by each ASEAN country has been enjoyed by the developed countries such as Singapore, Malaysia, and Thailand.

Abstrak: Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Kesepakatan Aliran Bebas Barang MEA 2015. Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa perkembangan nilai perdagangan Indonesia dengan negara intra-ASEAN terkait dengan kesepakatan aliran bebas barang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah nilai perdagangan Indonesia dengan negara intra-ASEAN semakin meningkat. Namun secara keseluruhan pembukaan pasar oleh masing-masing negara ASEAN lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Kata Kunci: Integrasi Ekonomi, Aliran Bebas Barang, MEA 2015

PENDAHULUAN

Kerangka aliran bebas barang yang termuat dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjelaskan mengenai arah dan cara mencapai MEA 2015 yang meliputi penghapusan hambatan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan fasilitas perdagangan lainnya. Fasilitasi perdagangan adalah komponen kunci dari agenda integrasi ekonomi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Realisasi dari visi MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi melibatkan anggota-negara bekerja sama untuk menghapus kedua hambatan tarif dan nontarif untuk perdagangan.¹

Target waktu pencapaian MEA terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015.² Cetak Biru pada dasarnya adalah sebuah rencana induk yang difor-

mulasikan untuk membimbing pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan cara merinci langkah-langkah integrasi pembangunan ekonomi dan integrasi penuh ke dalam ekonomi global.³ Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN/ASEAN Community dari tahun 2020 menjadi 2015.

Dengan dihapuskannya hambatan tarif dan non-tarif, maka muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini, *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia. Ini, tentu saja, akan me-

¹ Veredigna M. Ledda. 2012. AEC 2015: Issues and Challenges in Standards and Conformance. *Philippine Journal of Development*. Vol. 39 (1, 2). Hlm. 172.

² Syamsul Arifin, Rizal A. Djaafara, Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT Elex media Komputindo. Hlm. 15.

³ Guido Benny, Ravichandran Moorthy, Sity Daud, and Zarina Othman. 2015. Impact of Nationalist Sentiments and Commitment for Prioritising the ASEAN Economic Community: Empirical Analysis from Survey in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol. 6 (1). Hlm. 188.

ngancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia sendiri.⁴

Peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya hanya akan menjadi korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain.

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa perkembangan nilai perdagangan Indonesia dengan negara intra-ASEAN terkait dengan kesepakatan aliran bebas barang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal atau jamak.⁵ Secara teori, penelitian kualitatif dimulai dengan cara mendefinisikan konsep yang sangat umum, yang mengalami perubahan karena hasil penelitian sehingga variabel dapat merupakan produk atau hasil.⁶ Selanjutnya metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini berupaya memperjelas dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan sebelumnya dengan cara melihat dan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena dan situasi yang sedang diteliti.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dokumentasi atau *library research*. Teknik *library research* berupaya untuk mengumpulkan data-data yang tercatat ataupun terekam sebagai data sekunder.

Data-data sekunder tersebut diambil dari berbagai bahan bacaan, seperti buku teks, jurnal, dan dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, langkah strategis yang dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang strategis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka menciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut diantaranya:

- a. Peningkatan Daya Saing Ekonomi. Daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN sebagai *single market and production base*, daya saing merupakan salah pilar MEA 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan daya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan internasional. Hal ini pun merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi MEA 2015.⁷
- b. Perbaikan Infrastruktur Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain:
 - i. Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat;
 - ii. Membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan;
 - iii. Meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi. Logistik juga merupakan bagian terpenting dari

⁴ Veredigna M. Ledda, *op.cit.*, hlm. 4.

⁵ Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga. Hlm. 22.

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷ Sholeh, 2013, *Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 1 (2). Hlm. 6.

infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya. Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu. Inflasi pun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnya logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan di dalam proses pelaksanaan ASEAN economic community 2015.⁸

- c. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah Penguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan.⁹
- d. Pemberdayaan UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis

dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan upaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM ternyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.¹⁰

- e. Peningkatan Ekspor
- i. Berdasarkan empiris produk utama dan continue ekspor yang potensial untuk ditingkatkan dalam upaya merubah struktur ekspor dari dominasi komoditi dan bahan baku menjadi produk industry (manufaktur). Dengan ekspor Unggulan: TPT, Elektronik, Karet dan produk karet, Minyak Kelapa Sawit, Produk Hutan, Alas Kaki, Otomotif, Udang, Coklat, Kopi; dan Ekspor Potensial: Kulit dan Produk Kulit, Peralatan dan instrumen medis, Rempah-rempah untuk obat, Makanan Olahan, Essential Oil, Ikan dan produk ikan, Produk kerajinan, Perhiasan, Bumbu, Peralatan tulis selain kertas.
 - ii. Pertanian. Potensi peningkatan ekspor hanya pada komoditi/ produk perkebunan seperti: Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao dan Kopi. Namun produk tanaman pangan sulit dikurangi seperti: Gandum, Kedelai, Jagung, Kacang Tanah, Beras dan Ubi Kay ketergantungan impor Gandum dan Kedelai sangat tinggi.
 - iii. Strategi Meningkatkan Ekspor Produk Industri/ Manufaktur. Pengembangan industry: fokus pada produk unggulan dan potensial ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada; Meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi:

⁸ Bank Indonesia (BI), 2009, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia. Hlm. 62.

⁹ Thee Kian, 2003, Competition policy in Indonesia and the new anti-monopoly and fair competition law, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 38 (3). Hlm. 331 – 334.

¹⁰ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2008, *ASEAN Economic Blueprint*, 2015, Jakarta: BPPK Kemelu-RI. Hlm. 62 – 63.

fokus industry jangan hanya memenuhi pasar domestik tetapi juga pasar di 9 negara ASEAN.

- iv. *Regional Value Chain (RVC)*. Memanfaatkan pasar ASEAN tidak hanya sebagai tujuan ekspor namun sebagai sumber input murah bagi pengembangan industry yang lebih efisien berdaya saing. MEA jangan hanya dilihat sebagai tujuan pasar saja tetapi manfaatkan ASEAN dalam konteks regional value chain (RVC). Indonesia berpotensi memanfaatkan RVC untuk Otomotif, TPT, dan Pangan Olahan. Jadi jangan berpikir akan menguasai seluruh rantai nilai, fokus di segmen industry yang secara *comparative* Indonesia lebih baik.¹¹
- f. Strategi perdagangan internasional. Strategi perdagangan internasional yang dilaksanakan Indonesia dalam meningkatkan ekspor dan meningkatkan konsumsi dalam negeri terhadap produk-produk kita sendiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 74 ayat 1, dalam rangka pengembangan ekspor, pemerintah melakukan pembinaan ekspor terhadap pelaku usaha untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri.¹² Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 22 ayat 1, disebutkan, dalam rangka pengembangan, pemberdayaan dan penguatan perdagangan dalam negeri, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Regulasi tersebut terasa penting bila mempertimbangkan kondisi perdagangan Indonesia selama ini yang belum optimal memanfaatkan potensi pasar ASEAN.¹³ UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia mem-

bandung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. UU ini, antara lain, mengatur ketentuan umum tentang perijinan. Bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia dalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pula Pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional, misalnya untuk melindungi keamanan nasional.¹⁴

Dengan memahami berbagai strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, teori merkantilisme lebih tepat untuk menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Teori merkantilisme sendiri merupakan sebuah pandangan yang menganggap bahwa perekonomian internasional bersifat konfliktual karena kepentingan nasional masing-masing negara saling bertentangan. Selain itu merkantilisme juga meyakini bahwa politik memiliki peran utama dalam membangun negara modern melalui kebijakan-kebijakan ekonominya. Dengan kata lain ekonomi menjadi alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan negara sebagai aktor utama. Menurut teori ini dengan sifat konfliktual yang ada di perekonomian internasional akan menghasilkan keuntungan *zero-sum game*. Artinya keuntungan yang didapat tidak akan saling menguntungkan melainkan suatu negara akan berusaha mendapat keuntungan yang mutlak dan pasti demi tercapainya kepentingan nasionalnya.

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dari teori merkantilisme yang telah penulis paparkan, maka di sini penulis mencoba untuk menganalisa dengan menggunakan neraca perdagangan Indonesia dengan Negara Intra ASEAN setelah Aliran Bebas Barang MEA diimplementasikan dan berbagai strategi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 2011 s/d 2015. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan positif dengan negara intra-ASEAN (Kamboja, Myanmar, Filipina) yang artinya terjadi surplus

¹¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Meningkatkan Daya Saing Meraih Peluang*, Jakarta: Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Hlm. 22 – 23.

¹² *ibid.*, hlm. 10.

¹³ *ibid.*

¹⁴ *ibid*

perdagangan. Namun neraca perdagangan Indonesia dengan Laos mengalami defisit pada tahun 2013 – 2014 dan kembali surplus pada tahun 2015. Sedangkan neraca perdagangan Indonesia dengan Brunai, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam mengalami defisit setiap tahunnya. Walaupun demikian pelaksanaan fasilitasi perdagangan yang mencakup penghapusan hambatan non-tarif terhadap produk pertanian, produk makanan dan makanan olahan, dan teknik kepabeanaan yang modern sehingga barang-barang dapat dikeluarkan dengan cepat telah mendorong nilai perdagangan Indonesia, meskipun nilai ekspor Indonesia belum bisa mengimbangi nilai impor dari negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Berdasarkan teori neoliberalisme yang dikemukakan oleh Smith bahwa pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Sejalan dengan itu, kemudian praktik perdagangan internasional mulai mengarah pada bentuk liberalisasi yang menginginkan adanya pasar tunggal di tingkat global. Hal inilah yang akhirnya mendorong dihapuskannya batas-batas negara yang juga menuntut dihilangkannya hambatan-hambatan dalam perdagangan.

Kemudian yang diuntungkan dalam posisi ini tentu saja perusahaan-perusahaan MNC negara maju karena disinilah terbentuknya monopoli produksi, karena hanya perusahaan MNC yang mampu memiliki barang-barang jadi yang akan ditawarkan kepada konsumen, sedangkan peran dari industry negara berkembang seperti Indonesia hanya sebagai pemasok bahan-bahan mentah dalam produk milik MNC negara maju.

SIMPULAN

Diimplementasikannya Aliran Bebas Barang sesuai skema cetak biru MEA, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh Indonesia, yaitu: pertama, Indonesia akan bersaing secara penuh dengan produksi barang 10 negara ASEAN, maka kualitas yang ada serta pajak yang lebih tinggi dan biaya (legal dan ilegal) akan membuat Indonesia sulit bersaing; kedua, gerakan bebas tenaga kerja akan memberikan

dampak yang luar biasa bagi Indonesia; dan yang ketiga, persaingan investasi yang semakin berat sehubungan dengan prinsip pergerakan bebas modal. Sehingga untuk menangani hal ini Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing, strategi peningkatan ekspor dan strategi perdagangan internasional.

Secara teoritis, integrasi ekonomi memang menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara didalamnya, diantaranya melalui pembukaan akses pasar lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh banyaknya hasil empiris yang menunjukkan adanya hubungan positif antara integrasi ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat sebaliknya, dimana integrasi ekonomi hanya memberi dampak positif pada negara-negara yang lebih maju. Hal ini terlihat dari nilai perdagangan Indonesia dengan negara intra-ASEAN semakin meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, nilai impor dari negara anggota ASEAN masih melebihi nilai ekspor Indonesia ke negara Anggota ASEAN, sehingga secara keseluruhan pembukaan pasar oleh masing-masing negara ASEAN lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiprawiro. 2014. *Teori Perdagangan Internasional (Merkantilisme Klasik), dalam Ekonomi Internasional*. Universitas Gunadarma.
- Arifin, Syamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik (BPPK Kemenlu-RI). 2008. *ASEAN Economic Blueprint 2015*. Jakarta: BPPK Kemenlu-RI.
- Bank Indonesia (BI). 2009. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Benny, Guido, Ravichandran Moorthy, Sity Daud, dan Zarina Othman. 2011. Impact of Nationalist Sentiments and Commitment for Prioritising the ASEAN Economic Community: Empirical Analysis from Survey in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, MC SER Publishing, Rome-Italy. Vol. 6 (1). Hlm. 188 – 199.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2010. *Menuju Asean Economic Community 2015*. Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. 2015. *Menjadi Juara di Era MEA 2015*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Firdaus, Ahmad Yarist dan Muhammad Andi Hakim. 2013. Penerapan “Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources” Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 2 (2). Hlm. 152 – 163.
- Hidayat, Agus Syarif. 2008. ASEAN Economic Community (AEC): Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 16 (2). Hlm. 29 – 31.
- Kian. 2003. Competition policy in Indonesia and the new anti-monopoly and fair competition law. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 38 (3). Hlm. 64 – 77.
- Ledda, Veredigna M. 2012. AEC 2015: Issues and Challenges in Standards and Conformance. *Philippine Journal of Development*. Vol. 39 (1, 2). Hlm. 171 – 188.
- Sholeh. 2013. Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 1 (2). Hlm. 509 – 522.